

LEGITIMASI ULAMA DALAM KONTEKS POLITIK STUDI KASUS: PADANG LAWAS UTARA

Raufan Syiddik¹, Zainal Efendi Hsb¹

¹Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: rauvansyiddik@gmail.com, zainal80.yes@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the role of the legitimacy of ulama in the political and social dynamics in North Padang Lawas Regency. The focus of the study includes the strategy for preventing radicalism implemented by the Ministry of Religious Affairs, the phenomenon of dynasty politics at the village level, the dynamics of political party coalitions in the 2018 Pilkada, and the political participation of the Karang Taruna youth organization. The findings show that ulama play an important role as a source of moral and symbolic legitimacy that influences various aspects of local political life. In the context of preventing radicalism, ulama are the main agents in spreading messages of religious moderation that support social stability. In the realm of village politics, the legitimacy of ulama helps strengthen the power structure of the dynasty that relies on kinship networks and the support of religious figures. In the Pilkada process, the involvement of ulama is a crucial strategy for political parties in building coalitions and gaining public support, while Karang Taruna as a youth organization is also influenced by the legitimacy of ulama in determining the political attitudes of its members. This study confirms that the legitimacy of ulama is not only religious in dimension, but also becomes significant socio-political capital in shaping public opinion and influencing the local democratic process. However, the involvement of ulama in practical politics also raises ethical challenges that need to be managed so that their role remains constructive and ethical in supporting community development and a healthy democratic life.

Keywords: Legitimacy of clerics; local politics; North Padang Lawas; religion and politics; religious moderation

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran legitimasi ulama dalam dinamika politik dan sosial di Kabupaten Padang Lawas Utara. Fokus penelitian mencakup strategi pencegahan radikalisme yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, fenomena politik dinasti di tingkat desa, dinamika koalisi partai politik dalam Pilkada 2018, serta partisipasi politik organisasi kepemudaan Karang Taruna. Temuan menunjukkan bahwa ulama berperan penting sebagai sumber legitimasi moral dan simbolik yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan politik lokal. Dalam konteks pencegahan radikalisme, ulama menjadi agen utama penyebaran pesan moderasi beragama yang mendukung stabilitas sosial. Di ranah politik desa, legitimasi ulama turut memperkuat struktur kekuasaan dinasti yang mengandalkan jaringan kekerabatan dan dukungan tokoh agama. Dalam proses Pilkada, keterlibatan ulama menjadi strategi krusial bagi partai politik dalam membangun koalisi dan memperoleh dukungan masyarakat, sementara Karang Taruna sebagai organisasi pemuda juga terpengaruh oleh legitimasi ulama dalam menentukan sikap politik anggotanya. Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi ulama tidak hanya berdimensi keagamaan, tetapi juga menjadi modal sosial-politik yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi proses demokrasi lokal. Namun, keterlibatan ulama dalam politik praktis juga menimbulkan tantangan etis yang perlu dikelola agar peran mereka tetap konstruktif dan beretika dalam mendukung pembangunan masyarakat dan kehidupan demokrasi yang sehat.

Kata Kunci: Legitimasi ulama; politik lokal; Padang Lawas Utara; agama dan politik; moderasi beragama

PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat Muslim, ulama memiliki posisi sentral sebagai pemimpin spiritual, pendidik, dan penjaga moralitas umat. Tidak hanya dalam ranah keagamaan, ulama juga kerap memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika memasuki ruang politik elektoral, di mana suara dan dukungan ulama dapat mempengaruhi preferensi politik masyarakat. Kecenderungan masyarakat untuk mengikuti arahan ulama dalam menentukan pilihan politik menandakan adanya bentuk legitimasi sosial dan moral yang diberikan kepada ulama sebagai figur otoritatif (Ismail, 2014; Ni'am, 2023).

Di Indonesia, hubungan antara agama dan politik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah sosial-politik bangsa. Meski secara konstitusional Indonesia bukan negara agama, peran agama dan tokoh-tokoh keagamaan tetap signifikan dalam dinamika politik lokal maupun nasional. Dalam banyak kasus, ulama tampil bukan hanya sebagai penentu arah moralitas politik, tetapi juga sebagai aktor politik aktif yang ikut menentukan arah dan kepemimpinan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mahadi, 2015; Suhaidi & Sihabuddin, 2020).

Padang Lawas Utara, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki basis masyarakat Muslim yang kuat, menyuguhkan dinamika tersendiri dalam hubungan antara ulama dan politik. Dalam praktik politik lokal, sering kali terlihat adanya kedekatan antara elite politik dan tokoh-tokoh agama, termasuk ulama. Dukungan atau ketidaksetujuan seorang ulama terhadap calon pemimpin dapat berpengaruh besar terhadap legitimasi politik figur tersebut di mata masyarakat. Realitas ini menimbulkan berbagai implikasi. Di satu sisi, keterlibatan ulama dalam politik dapat menjadi sarana penyampaian nilai-nilai etika dan keadilan dalam proses demokrasi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa ulama bisa saja terseret ke dalam politik praktis yang berpotensi mereduksi otoritas keagamaannya menjadi sekadar alat legitimasi politik kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana bentuk, sumber, dan batasan legitimasi ulama dalam konteks politik lokal, khususnya di Padang Lawas Utara.

Di berbagai daerah, termasuk Padang Lawas Utara, keterlibatan ulama dalam proses politik lokal menjadi fenomena yang mencolok. Ulama tidak hanya berperan sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pemberi rekomendasi politik, bahkan dalam beberapa kasus menjadi bagian dari tim sukses calon tertentu. Fenomena “salam komando” antara ulama dengan calon kepala daerah di mimbar-mimbar pengajian, seruan untuk memilih “pemimpin yang direstui ulama”, hingga kampanye berbasis pesantren atau majelis taklim menjadi pemandangan umum menjelang pemilihan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan legitimasi yang dimiliki ulama dalam membentuk persepsi dan orientasi politik masyarakat.

Fenomena lain yang menonjol adalah munculnya segmentasi politik berbasis afiliasi keagamaan. Di Padang Lawas Utara, sebagian masyarakat lebih percaya memilih kandidat politik yang mendapat restu atau dukungan dari ulama tertentu yang mereka hormati. Seringkali, keputusan politik diambil bukan berdasarkan visi-misi atau rekam jejak calon, melainkan atas dasar “siapa yang direkomendasikan oleh tuan guru atau ustaz kami.” Dalam hal ini, kharisma dan ketokohan ulama menjadi komoditas politik yang bernilai tinggi. Namun demikian, fenomena ini juga memunculkan sejumlah problematika. Salah satunya adalah pergeseran posisi ulama dari independen ke arah keterlibatan dalam politik praktis. Terdapat kasus di mana ulama terlibat langsung dalam konflik kepentingan, misalnya dengan menerima kompensasi politik tertentu, seperti proyek sosial-keagamaan atau dukungan finansial untuk pesantren. Bahkan dalam beberapa situasi, keterlibatan ulama dalam politik justru menciptakan polarisasi di tengah umat, terutama ketika terjadi perbedaan dukungan antar-ulama terhadap kandidat yang berbeda. Akibatnya, ukhuwah Islamiyah di masyarakat bisa terganggu oleh perbedaan preferensi politik yang dibungkus dalam simbol-simbol keagamaan.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian hubungan antara agama dan politik dengan mengambil fokus pada konteks lokal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam kajian akademik, khususnya dalam studi mengenai legitimasi ulama. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti peran ulama dalam skala nasional atau wilayah perkotaan besar, maka studi ini mencoba menggali secara lebih mendalam bagaimana proses legitimasi ulama terjadi di tingkat daerah, tepatnya di Padang Lawas Utara sebuah wilayah dengan struktur sosial keagamaan yang khas dan hubungan interpersonal yang kuat antara tokoh agama dan masyarakat. Selain itu, konteks sosial-budaya Padang Lawas Utara yang memiliki karakteristik masyarakat religius dan kental dengan nilai-nilai lokal menjadikan temuan penelitian ini memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman bahwa pola legitimasi ulama tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial, tradisi lokal, dan kepentingan politik setempat. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, penelitian ini menyajikan data empiris yang dapat memperkaya perspektif teoritis tentang relasi ulama dan politik dalam konteks Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utama penelitian ini adalah menggali secara mendalam dinamika legitimasi ulama dalam konteks politik lokal di wilayah Padang Lawas Utara (Sugiyono, 2013). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami realitas sosial-politik yang kompleks dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan persepsi, relasi kuasa, simbolisme keagamaan, serta makna yang dikonstruksi oleh para

aktor dalam konteks lokal. Pemilihan Padang Lawas Utara sebagai lokasi studi didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat, dengan peran ulama yang masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah. Selain itu, wilayah ini relatif belum banyak dijadikan objek kajian ilmiah dalam konteks hubungan antara agama dan politik, sehingga memberikan ruang kebaruan sekaligus kekayaan data empiris yang bernilai.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung interaksi antara ulama, masyarakat, dan aktor politik di lapangan, baik dalam konteks kegiatan keagamaan maupun politik. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan kunci, seperti tokoh ulama, calon kepala daerah, tim sukses, serta masyarakat yang menjadi konstituen dari kedua belah pihak. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, agar peneliti dapat menggali informasi secara terbuka namun tetap dalam kerangka pertanyaan penelitian. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap materi kampanye, selebaran, video dakwah politik, hingga arsip media lokal yang berkaitan dengan keterlibatan ulama dalam politik.

Dalam menentukan informan, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi strategis terkait dengan topik penelitian. Selain itu, teknik snowball sampling juga digunakan untuk menelusuri informan tambahan yang relevan berdasarkan rekomendasi dari narasumber sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif model interaktif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik yang menjelaskan pola-pola temuan di lapangan. Sementara itu, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dengan tetap memperhatikan konteks lokal dan dinamika sosial-politik yang ada. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, dilakukan juga konfirmasi hasil sementara kepada informan untuk menghindari kesalahan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Strategi Pencegahan Radikalisme oleh Kementerian Agama Padang Lawas Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara telah menerapkan sejumlah strategi dalam upaya pencegahan radikalisme keagamaan yang dianggap berpotensi merusak tatanan sosial dan merongrong stabilitas daerah. Strategi yang digunakan bersifat edukatif, kolaboratif, dan persuasif, dengan menitikberatkan pada pendekatan keagamaan yang moderat melalui pelibatan aktif para ulama, tokoh agama, dan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pondok pesantren. Salah satu bentuk nyata dari strategi ini adalah program penguatan moderasi beragama yang dijalankan melalui pelatihan dan pembinaan kepada penyuluh agama Islam, guru Pendidikan Agama Islam, serta dai lokal.

Program-program ini dirancang untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan toleransi, dengan materi yang menekankan pentingnya Islam rahmatan lil 'alamin, semangat ukhuwah Islamiyah, serta penghindaran terhadap tafsir-tafsir keagamaan yang ekstrem dan eksklusif. Dalam implementasinya, Kementerian Agama menjalin kerja sama dengan ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah, dan pemerintah kabupaten setempat. Ulama setempat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pesan-pesan moderat kepada jamaahnya melalui mimbar-mimbar masjid, pengajian, dan media sosial lokal. Namun demikian, temuan di lapangan juga mengindikasikan bahwa keberhasilan strategi ini sangat dipengaruhi oleh *legitimasi sosial dan religius* yang dimiliki para ulama di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, peran ulama bukan hanya sebagai penyampai dakwah, tetapi juga sebagai agen legitimasi terhadap narasi keagamaan yang dikampanyekan oleh pemerintah, termasuk narasi anti-radikalisme. Legitimasi tersebut membuat pesan-pesan moderat yang mereka sampaikan lebih diterima oleh masyarakat, terutama di kalangan akar rumput.

Kaitan antara strategi pencegahan radikalisme dan legitimasi ulama dalam konteks politik menjadi semakin jelas ketika ditemukan bahwa beberapa ulama yang mendapat legitimasi tinggi dari masyarakat juga menjadi figur yang dilibatkan dalam proses politik lokal, baik secara langsung sebagai calon legislatif maupun sebagai pendukung calon kepala daerah tertentu. Hal ini menunjukkan adanya irisan peran antara ulama sebagai penjaga stabilitas keagamaan dan sebagai aktor yang memiliki pengaruh dalam politik praktis. Fenomena ini menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa keberhasilan strategi pencegahan radikalisme bukan hanya soal kebijakan struktural dari pemerintah, tetapi juga sangat ditentukan oleh relasi sosial-politik yang dijalankan oleh para ulama di tengah masyarakat. Ketika ulama memiliki legitimasi yang kuat dan menjaga independensi moralnya, mereka berperan efektif dalam menangkal paham-paham radikal. Sebaliknya, ketika

ulama terlalu larut dalam kontestasi politik praktis dan kehilangan kredibilitas moral, efektivitas pesan keagamaannya, termasuk yang berkaitan dengan moderasi dan anti-radikalisme, cenderung menurun.

2. Politik Dinasti dalam Kepemimpinan Desa Mangaledang Lama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena politik dinasti dalam kepemimpinan Desa Mangaledang Lama merupakan realitas politik lokal yang cukup kuat dan telah berlangsung selama beberapa periode kepemimpinan. Pola regenerasi kepemimpinan di desa ini tidak sepenuhnya berbasis pada kompetisi terbuka atau pemilihan yang demokratis dalam arti substantif, melainkan cenderung mempertahankan jalur kekuasaan dalam lingkaran keluarga atau kerabat dari kepala desa sebelumnya. Hal ini ditandai dengan munculnya calon-calon kepala desa yang memiliki hubungan darah atau afiliasi keluarga dekat dengan pemimpin desa terdahulu, serta minimnya ruang politik bagi warga di luar lingkaran tersebut untuk tampil sebagai pemimpin alternatif. Dalam proses pemilihan, dukungan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh program atau visi-misi calon, tetapi juga oleh relasi kekerabatan, jaringan sosial, dan afiliasi keagamaan. Salah satu temuan menarik dari penelitian ini adalah peran tokoh agama, khususnya ulama lokal, yang secara tidak langsung turut memberikan legitimasi terhadap berlangsungnya praktik politik dinasti. Ulama atau tokoh agama yang memiliki hubungan baik dengan dinasti politik desa tersebut seringkali tampil dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial yang diselenggarakan oleh keluarga penguasa desa, bahkan kadang ikut memberikan restu secara simbolik maupun verbal terhadap calon yang berasal dari keluarga tersebut.

Dalam konteks ini, legitimasi ulama memainkan peran penting sebagai penguat atau pelindung moral bagi sistem kekuasaan yang berlangsung. Masyarakat yang menghormati ulama tidak jarang mengikuti arahan atau isyarat dukungan yang diberikan, meskipun secara tidak langsung. Bahkan, dalam beberapa kasus, ulama dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk menilai apakah calon kepala desa layak didukung, bukan berdasarkan kapabilitas administratif atau integritas personal, tetapi karena hubungan calon tersebut dengan ulama yang dihormati. Dengan demikian, kekuatan legitimasi keagamaan ikut menopang struktur politik dinasti yang sudah mapan. Keterlibatan ulama dalam konteks ini tidak selalu bersifat aktif atau eksplisit, tetapi pengaruh mereka sangat terasa dalam proses pembentukan opini publik di tingkat desa. Ini menunjukkan bahwa ulama di wilayah pedesaan seperti Mangaledang Lama tidak hanya berperan dalam membimbing keagamaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam konstruksi kekuasaan lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Legitimasi ulama menjadi alat yang sangat strategis bagi elite politik lokal, termasuk dalam melanggengkan kekuasaan berbasis dinasti. Temuan ini memperkuat argumen utama dalam penelitian bahwa legitimasi ulama dalam konteks politik di Padang Lawas Utara bukan hanya menjadi sumber pengaruh keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika kekuasaan lokal. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi otoritas ulama, dukungan simbolik dari tokoh agama dapat dimaknai sebagai restu ilahiah yang memperkuat posisi politik seseorang, termasuk dalam sistem yang cenderung tertutup seperti politik dinasti.

3. Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pilkada 2018

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dinamika koalisi partai politik dalam Pilkada 2018 di Padang Lawas Utara menunjukkan pola pragmatisme politik yang sangat kental. Pembentukan koalisi antarpolisi tidak sepenuhnya didasarkan pada kesamaan ideologi, visi misi pembangunan daerah, atau komitmen terhadap kepentingan rakyat, melainkan lebih pada pertimbangan kekuatan elektoral dan peluang kemenangan. Koalisi antarpolisi sering kali terbentuk karena faktor figur calon bupati dan jaringan politiknya, termasuk kedekatan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, terutama para ulama dan tokoh agama. Dalam proses koalisi, terlihat bahwa partai-partai politik sangat memperhitungkan sejauh mana calon yang mereka usung mendapatkan dukungan dari tokoh agama setempat. Hal ini terjadi karena dalam konteks sosial-politik Padang Lawas Utara, ulama masih memegang peran sentral dalam membentuk opini masyarakat. Beberapa partai bahkan secara eksplisit melakukan pendekatan kepada ulama atau organisasi keagamaan untuk mendapatkan dukungan simbolik atau moral. Dukungan ini kemudian digunakan untuk memperkuat legitimasi calon yang diusung dalam kampanye politik, baik secara langsung melalui testimoni keagamaan, maupun secara tidak langsung melalui kehadiran tokoh agama dalam acara-acara politik.

Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa ada beberapa ulama yang secara aktif memberi dukungan terhadap pasangan calon tertentu, baik karena kedekatan personal, pertimbangan ideologis, atau bahkan posisi strategis yang dijanjikan setelah pemilihan. Keterlibatan ulama dalam proses politik ini menambah dimensi baru dalam dinamika koalisi partai politik, di mana restu ulama menjadi bagian dari strategi pemenangan yang diperhitungkan secara serius. Namun demikian, tidak semua ulama bersikap aktif dalam politik praktis. Sebagian besar memilih bersikap netral secara formal, tetapi tetap memiliki pengaruh besar melalui pernyataan, sikap, dan bahasa tubuh mereka di ruang publik. Netralitas ini justru semakin meningkatkan legitimasi mereka, dan pada akhirnya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menunjukkan bahwa calon mereka didukung oleh tokoh agama yang dihormati masyarakat.

Keterkaitan antara dinamika koalisi partai dan legitimasi ulama dalam Pilkada 2018 memperlihatkan adanya simbiosis mutualisme antara kekuatan politik dan otoritas keagamaan. Di satu sisi, partai politik membutuhkan legitimasi moral dari

ulama untuk meningkatkan elektabilitas calon, sementara di sisi lain, sebagian ulama memanfaatkan momentum politik untuk memperkuat pengaruh sosialnya di tengah masyarakat atau untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dinamika ini mempertegas bahwa dalam konteks politik lokal Padang Lawas Utara, legitimasi ulama bukan sekadar faktor moral atau spiritual, tetapi telah menjadi bagian dari kalkulasi politik elektoral. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa untuk memahami politik lokal secara utuh, tidak cukup hanya melihat konfigurasi partai politik atau aliansi strategis semata, tetapi juga harus melihat bagaimana kekuatan simbolik ulama beroperasi dalam proses pembentukan dan keberlangsungan koalisi politik.

4. Partisipasi Politik Karang Taruna dalam Pilkada 2018

Penelitian ini menemukan bahwa Karang Taruna, sebagai organisasi kepemudaan yang berakar kuat di tingkat desa dan kelurahan, memainkan peran yang cukup signifikan dalam dinamika politik lokal, khususnya pada Pilkada 2018 di Padang Lawas Utara. Meskipun secara struktural Karang Taruna merupakan lembaga sosial non-partisan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggotanya terlibat secara aktif dalam proses politik, baik sebagai relawan tim sukses, penggerak massa, hingga bagian dari strategi pemenangan pasangan calon tertentu. Partisipasi ini bersifat tidak seragam sebagian Karang Taruna bersikap netral, sementara sebagian lainnya menunjukkan keberpihakan yang jelas. Keterlibatan mereka biasanya dipengaruhi oleh kedekatan personal antara pengurus Karang Taruna dengan tokoh politik atau karena afiliasi sosial-budaya dan agama yang kuat di komunitas setempat. Dalam banyak kasus, arah dukungan Karang Taruna sangat dipengaruhi oleh tokoh agama atau ulama yang menjadi panutan komunitas pemuda di daerah tersebut.

Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya keterkaitan erat antara legitimasi ulama dan sikap politik anggota Karang Taruna. Ulama yang dihormati oleh pemuda sering kali menjadi rujukan dalam mengambil keputusan politik, termasuk dalam menentukan siapa yang layak didukung dalam Pilkada. Tidak jarang, ceramah atau pernyataan simbolik dari ulama lokal menjadi pemicu konsolidasi suara di kalangan pemuda, yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk dukungan nyata terhadap pasangan calon tertentu.

Selain itu, keterlibatan Karang Taruna dalam Pilkada juga sering dimobilisasi oleh aktor-aktor politik melalui pendekatan kultural dan keagamaan. Kandidat yang mampu membangun citra religius dan memperoleh restu dari tokoh agama memiliki peluang lebih besar untuk menarik simpati kelompok muda. Dalam konteks ini, legitimasi ulama menjadi semacam "aset politik" yang dapat membentuk orientasi politik Karang Taruna secara kolektif. Namun, partisipasi politik Karang Taruna tidak sepenuhnya berjalan tanpa problem. Penelitian mencatat adanya kekhawatiran sebagian masyarakat tentang netralitas organisasi ini yang mulai kabur akibat keterlibatan aktif dalam kontestasi politik. Beberapa anggota Karang Taruna bahkan mengungkapkan dilema antara menjaga netralitas organisasi dan loyalitas terhadap tokoh agama atau tokoh politik yang mereka hormati. Di sisi lain, sebagian pemuda justru melihat keterlibatan ini sebagai bentuk nyata dari kesadaran politik dan ekspresi keberpihakan terhadap pemimpin yang dianggap dekat dengan nilai-nilai keislaman dan perjuangan masyarakat kecil. Keterlibatan Karang Taruna dalam Pilkada 2018 memperkuat argumen bahwa politik lokal di Padang Lawas Utara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tokoh agama. Ulama tidak hanya menjadi penentu dalam kontestasi ideologis keagamaan, tetapi juga berperan sebagai penentu arah gerak sosial-politik komunitas, termasuk kelompok pemuda. Dengan demikian, partisipasi politik Karang Taruna dalam Pilkada tidak hanya merepresentasikan aspirasi generasi muda, tetapi juga memperlihatkan bagaimana legitimasi ulama mampu menjangkau dan membentuk sikap politik lintas usia dan struktur sosial.

Legitimasi Ulama dalam Konteks Politik di Padang Lawas Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa legitimasi ulama dalam konteks politik di Padang Lawas Utara memiliki peran yang signifikan, baik secara simbolik maupun praktis. Ulama di daerah ini tidak hanya dipandang sebagai figur religius, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat yang memiliki otoritas moral dan sosial. Hal ini menjadikan mereka sebagai aktor penting dalam dinamika politik lokal, terutama dalam masa-masa pemilihan kepala daerah. Berdasarkan data wawancara dan observasi lapangan, mayoritas masyarakat Padang Lawas Utara masih menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan politik. Ulama yang memiliki pengaruh luas di komunitas cenderung digunakan oleh kandidat politik sebagai saluran legitimasi, baik secara langsung melalui dukungan terbuka maupun secara tidak langsung melalui simbol-simbol religius yang diasosiasikan dengan figur ulama tersebut. Dalam beberapa kasus, dukungan dari ulama setempat terbukti mampu mengalihkan preferensi politik masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterikatan kultural dan emosional yang kuat terhadap lembaga keagamaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa relasi antara ulama dan aktor politik tidak selalu bersifat netral atau objektif. Terdapat praktik-praktik politisasi agama yang dilakukan secara halus, seperti pendekatan personal kepada tokoh-tokoh ulama, pemberian bantuan kepada pesantren atau kegiatan keagamaan, hingga pembentukan citra religius oleh kandidat tertentu. Dalam konteks ini, ulama yang bersedia memberikan dukungan politik sering kali mengalami dilema etis antara menjaga integritas moral dan menjawab ekspektasi komunitas yang menghendaki keterlibatan mereka dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Di sisi lain, tidak semua ulama memilih untuk terlibat dalam politik praktis. Beberapa di

antaranya secara tegas menjaga jarak dengan dunia politik dan memilih untuk fokus pada peran dakwah dan pendidikan. Namun demikian, pengaruh mereka tetap terasa, karena pandangan dan sikap mereka terhadap isu-isu sosial dan politik tetap menjadi rujukan bagi masyarakat. Dalam beberapa kasus, ketidakterlibatan secara langsung justru meningkatkan otoritas moral mereka, sehingga tetap menjadi referensi penting dalam pembentukan opini publik.

Dari dinamika yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa legitimasi ulama dalam politik lokal Padang Lawas Utara bersifat dinamis dan kontekstual. Ia terbentuk dari kombinasi antara kredibilitas keagamaan, hubungan sosial dengan masyarakat, serta kemampuan membaca situasi politik. Legitimasi ini bisa menjadi kekuatan yang mendukung demokratisasi dan pembangunan masyarakat, tetapi juga berpotensi disalahgunakan jika tidak diimbangi dengan kesadaran kritis terhadap batas-batas etika dalam ruang publik. Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ulama memainkan peran sentral dalam proses politik lokal di Padang Lawas Utara, baik sebagai penjaga nilai maupun sebagai aktor yang memediasi antara agama dan kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong peran ulama yang konstruktif dan beretika dalam ruang politik, agar nilai-nilai keagamaan dapat menjadi penyeimbang dalam kehidupan demokrasi, bukan alat legitimasi semata.

Pembahasan

Penelitian ini mengungkap bahwa dalam konteks sosial-politik Padang Lawas Utara, legitimasi ulama memiliki peran sentral yang sangat kompleks dan multidimensi, terutama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari pencegahan radikalisme, kepemimpinan desa, dinamika koalisi politik, hingga partisipasi politik pemuda. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rachmadhani (2021) dan Hakim & Mukhlis (2023) yang menegaskan bahwa agama dan tokoh keagamaan dalam masyarakat tradisional memiliki otoritas moral yang melampaui ranah spiritual dan masuk ke dalam ranah sosial-politik, sehingga ulama tidak hanya menjadi figur religius, tetapi juga aktor politik yang berpengaruh.

Dalam upaya pencegahan radikalisme, Kementerian Agama Padang Lawas Utara telah mengimplementasikan strategi edukatif dan kolaboratif yang menitikberatkan pada pendekatan moderasi beragama dengan melibatkan ulama, tokoh agama, dan institusi pendidikan Islam. Strategi ini konsisten dengan model moderasi beragama yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Agama RI yang menempatkan ulama sebagai agen kunci dalam menyebarkan narasi Islam yang inklusif dan anti-ekstremisme. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada legitimasi sosial ulama di mata masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori Weberian tentang otoritas tradisional, di mana legitimasi yang melekat pada ulama menjadikan pesan-pesan mereka lebih efektif dalam memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Legitimasi ini tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga memiliki dimensi politik, terutama ketika ulama juga terlibat dalam kontestasi politik lokal, yang sekaligus menjadi arena negosiasi antara moral religius dan kepentingan politik praktis.

Dalam konteks politik lokal, fenomena politik dinasti di Desa Mangaledang Lama menunjukkan bagaimana legitimasi ulama menjadi instrumen strategis dalam melanggengkan kekuasaan keluarga penguasa desa. Konsep patronase dan legitimasi moral yang diberikan oleh ulama memperkuat dominasi elite tertentu. Ulama yang secara tidak langsung atau eksplisit memberikan restu menjadi “penjaga moral” yang memperkokoh struktur politik dinasti, sehingga masyarakat cenderung menerima kepemimpinan berdasarkan legitimasi keagamaan yang melekat pada figur calon kepala desa. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi keagamaan merupakan modal sosial penting yang mendukung mekanisme reproduksi kekuasaan politik di tingkat lokal.

Lebih jauh, dinamika koalisi partai politik dalam Pilkada 2018 Padang Lawas Utara juga memperlihatkan peran sentral ulama sebagai faktor penentu elektoral. Koalisi yang terbentuk lebih didasarkan pada pragmatisme politik dan kebutuhan mendapatkan legitimasi moral daripada kesamaan ideologis semata, sebagaimana dijelaskan oleh teori pragmatisme politik. Paparan ini sejalan dengan penelitian Azizah & Armoyu (2025) mengungkap bahwa dukungan ulama menjadi aset politik yang sangat berharga, dimana partai dan calon sangat memperhitungkan restu tokoh agama untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa kasus, keterlibatan ulama dalam politik praktis menimbulkan dilema etis, karena mereka harus menyeimbangkan antara menjaga kredibilitas moral dan menghadapi tekanan politik. Sementara itu, ulama yang memilih sikap netral justru sering kali memperoleh legitimasi lebih besar, yang kemudian dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat citra calon mereka. Fenomena ini menegaskan bahwa legitimasi ulama di Padang Lawas Utara bukan hanya sumber moral, tetapi bagian integral dari kalkulasi politik elektoral lokal.

Partisipasi politik Karang Taruna, sebagai organisasi pemuda, dalam Pilkada 2018 juga menunjukkan bagaimana legitimasi ulama memengaruhi orientasi politik generasi muda. Keterlibatan anggota Karang Taruna yang tidak seragam antara netral dan partisan sangat dipengaruhi oleh kedekatan mereka dengan ulama sebagai panutan spiritual dan sosial. Ceramah dan restu simbolik dari ulama menjadi katalis konsolidasi suara pemuda dan mobilisasi sosial-politik. Meski demikian, keterlibatan ini menimbulkan perdebatan tentang netralitas organisasi sosial, yang mencerminkan dilema antara loyalitas keagamaan dan sikap non-partisan organisasi pemuda. Secara keseluruhan, legitimasi ulama di Padang Lawas Utara berperan ganda sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan sekaligus aktor strategis dalam politik lokal. Peran ini dinamis dan kontekstual, tergantung pada kredibilitas keagamaan, relasi sosial, dan posisi ulama dalam jaringan politik lokal. Penelitian ini menguatkan argumentasi bahwa agama dan politik di daerah dengan komunitas religius yang kuat sulit dipisahkan secara tegas, sebagaimana ditegaskan oleh beberapa kajian tentang agama dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, peran ulama harus terus didorong agar bersifat konstruktif dan beretika, menjaga keseimbangan antara pengaruh keagamaan dan integritas moral, sehingga legitimasi ulama dapat menjadi penyeimbang yang memperkuat demokrasi dan pembangunan sosial di Padang Lawas Utara.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa legitimasi ulama di Padang Lawas Utara memegang peranan sentral dan multidimensional dalam dinamika sosial-politik lokal. Ulama tidak hanya dipandang sebagai figur keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial-politik yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pencegahan radikalisme hingga proses politik elektoral dan kepemimpinan desa. Legitimasi yang melekat pada ulama menjadi modal sosial yang strategis, yang mampu memperkuat narasi moderasi beragama, memperkokoh sistem politik dinasti, serta menjadi faktor penentu dalam pembentukan koalisi partai dan orientasi politik kelompok pemuda. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan simbolik dan moral ulama sangat diperhitungkan oleh aktor politik maupun masyarakat luas, sehingga kehadiran dan dukungan ulama kerap kali menjadi penentu keberhasilan berbagai agenda politik dan sosial di daerah tersebut. Namun, keterlibatan ulama dalam ranah politik juga membawa dilema etis dan risiko kehilangan kredibilitas moral jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peran ulama yang konstruktif dan beretika agar legitimasi mereka dapat menjadi penyeimbang yang memperkuat kehidupan demokrasi, stabilitas sosial, dan pembangunan masyarakat di Padang Lawas Utara secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Armoyu, M. (2025). Peran Ulama dalam Komunikasi Politik Lokal : Studi Strategi dan Pengaruh Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, 7(1), 215–241.
- Hakim, L., & Mukhlis, Z. (2023). Otoritas Agama di Ruang Siber: Fragmentasi dan Kontestasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 119–132. <https://doi.org/10.15642/jik.2023.13.2.119-132>
- Ismail, A. N. (2014). Ulama dan Pendidikan Islam Klasik (Kajian Ulama, Status Sosial, Kekuasaan, Pendidikan, dan Gerakan Intelektual). *Jurnal Media Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 87–98. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/jmpai/article/view/1298>
- Mahadi, U. (2015). Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu. *Addin*, 9(2), 229–252. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.614>
- Ni'am, M. (2023). Menakar Kembali Otoritas Ulama: Antara Kesalehan dan Komodifikasi Agama. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 8(2), 135–160. <https://doi.org/10.14421/jkii.v8i2.1349>
- Rachmadhani, A. (2021). Otoritas Keagamaan di Era Media Baru: Dakwah Gus Mus di Media Sosial. *PANANGKARAN, Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 5(2), 150–169. <https://grafis.tempo.co/read/1312/rumus-pendapatan-platform->
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhaidi, M., & Sihabuddin, S. (2020). Nilai Kearifan Lokal dalam Perilaku Politik Studi Analitis tentang Etika dan Sikap Berpolitik Santri di Madura. *JPW (Jurnal Politik Walisongo)*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i1.3631>